

ABSTRAK

PENERAPAN PRINSIP – PRINSIP DEMOKRASI DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (Studi Kasus di Desa Banyumas, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu)

Oleh

ADITIA ARIEF

Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan Pemerintahan desa. Sekaligus sarana pemerintah dan masyarakat Desa Banyumas dalam menyalurkan aspirasi pembangunan di desa Banyumas. Sesuai dengan empat prinsip demokrasi yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan ketaatan akan hukum. Yang di mana proses musrenbang masi menjadi tanda tanya, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, tidak adanya bentuk nyata pembangunan dalam musrenbang, tidak dilaksnakannya Musrenbang tingkat desa yang diadakan setahun sekali yang tercantum didalam undang undang desa. Untuk itu diharapkan musrenbang dapat menerapkan empat prinsip tersebut dalam prosesnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip Demokrasi dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan. Tipe penelitian yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses penerapan Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di Desa Banyumas tidak memenuhi prinsip-prinsip Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas dan Ketaatan akan Hukum. Kendalanya proses demokrasi dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di desa banyumas adalah kurangnya partisipasi masyarakat dan dana yang terbatas disebabkan karena tidak adanya bentuk nyata dan tidak efektif dalam rapat dan tidak jelas apa yang di dapat, itu yang menyebabkan masyarakat lebih memilih menyibukkan diri.

Kata kunci : Prinsip-Prinsip Demokrasi, Musrenbang.